

Dishub Layangkan Somasi pada PT ISS, Komisi B Minta Perhatikan Kekosongan Retribusi Parkir



KOTA-Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo sudah bulat untuk memutuskan kontrak kerja sama pengelolaan parkir di Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS). Dishub juga telah melayangkan somasi pertama terkait pemutusan kontrak itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga saat hearing dengan Komisi B DPRD Sidoarjo, Kamis (12/1). Somasi itu merupakan lanjutan dari langkah Dishub setelah sebelumnya melayangkan surat pemutusan kontrak kepada PT ISS. Pemutusan kontrak dilakukan per 9 Januari

ini. "Tidak ada tawar-menawar. Kami ingin putus kontrak," tegasnya.

Bagi Dishub, kerja sama itu sudah tidak bisa berlanjut karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Benny menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan langkah hukum.

Hal itu sebagai upaya jika nanti proses pemutusan kontrak ataupun somasi buntu dan perlu melalui langkah hukum. "Risiko hukum sudah dipelajari. Kalau bisa segera tempuh biar ada kejelasan," imbuhnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo

Bambang Pujiyanto menyampaikan terkait carut marut pengelolaan parkir di Sidoarjo. Ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian Komisi B terkait kerja sama parkir itu.

Sebelum ada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Komisi B telah mengingatkan terkait pencantuman kode rekening pembayaran. Tapi itu tidak dilakukan dan sempat bermasalah ketika pihak PT ISS hendak membayar setoran. "Kami kecewa itu," terang Bambang.

Politikus Gerindra itu menambahkan, langkah Dishub yang hendak menempuh jalur hukum

untuk menuntaskan persoalan kerja sama parkir itu juga berisiko. Yaitu terkait potensi pendapatan daerah dari retribusi parkir pada 2023.

Proses hukum itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jika selama proses hukum berlangsung kemudian parkir dibiarkan tidak dikelola maka retribusi akan kosong. Padahal di 2023 ini ada target pendapatan daerah dari retribusi parkir sebesar Rp 10,4 miliar. "Nanti target tidak terpenuhi, retribusi uang rakyat. Kasihan jika rakyat bayar parkir tapi tidak masuk ke daerah," jelasnya.

Ke Halaman 10



Dishub Layangkan Somasi...

Sementara itu bagi Benny, potensi kekosongan pengelolaan itu juga telah menjadi pertimbangan. "Ini kan pemerintahan. Nanti biar penga-

dilan atau pihak penengah yang menentukan. Jelas kami juga mengupayakan agar tidak ada kekosongan pengelolaan," terangnya.

Saat ini, PT ISS di lapangan juga masih sah untuk memungut parkir.

Karena memang masih menjadi haknya. "Masih sah untuk menarik," tutur Benny.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT ISS Dian Sutjipto menguraikan bahwa pemutusan kontrak itu juga

tidak bisa dilakukan secara sepihak. PKS yang telah dilakukan dengan Dishub didasari kesepakatan bersama. Karena itu untuk pemutusan juga perlu kesepakatan bersama. "Tidak bisa sepihak," pungkasnya. (son/vga)



Pengelolaan Parkir di Sidoarjo Ruwet

► Kontribusi Rp 32 Miliar Belum Pernah Setor ke Pemerintah

SIDOARJO. SURYA - Permasalahan pengelolaan parkir di Sidoarjo seperti tak ada habisnya. Dulu ketika diterapkan sistem parkir berlangganan banyak dikeluhkan masyarakat. Lalu ganti dengan sistem lelang, perjanjian kerja sama pun bermasalah hingga sekarang.

Tahun kemarin lelang pengelolaan parkir dimenangkan PT ISS dengan nilai kontribusi ke pemerintah sebesar Rp 32 miliar setahun. Namun sampai sekarang PT ISS belum pernah setor ke pemerintah. "Kami sengaja

panggil Kepala Dishub Sidoarjo untuk mendengarkan persoalan apa saja yang terjadi. Mulal awal kerja sama sampai persoalan yang terjadi sekarang ini," kata Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujtando, Kamis (12/1).

Terbaru, Dishub juga memutuskan kontrak kerja sama dengan PT ISS terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 kemarin. Namun di sisi lain PT ISS tetap menjalankan aktivitasnya dengan menarik retribusi parkir di sejumlah titik yang mereka kelola selama ini.

Dewan juga mempertanyakan angka retribusi parkir yang masuk selama tahun 2022 cuma sebesar Rp 544 juta. Selain itu, juga terkait informasi adanya rencana addendum dengan PT ISS dan sejumlah persoalan lain.

"Jika mengaju kepada PKS itu, harusnya daerah dapat Rp 32 miliar setahun. Kemudian ditambah 7,5 persen di tahun berikutnya. Tapi faktanya blong," tambah Sudjalil, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.

Pihaknya juga mewanti-wanti Dishub agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena Sidoarjo sudah tiga tahun kehilangan pendapatan besar dari retribusi. Yakni sejak

2020 ketika sistem parkir berlangganan dihentikan, kemudian 2021 dan 2022 juga tidak dapat apa-apa karena masa transisi pengelolaan.

"Melihat beberapa persoalan yang terjadi, tahun 2023 ini target pendapatan dari retribusi parkir di Sidoarjo sebesar Rp 10,4 miliar. Jangan sampai ini juga kembali hilang seperti tahun-tahun kemarin. Masyarakat tetap ditarik retribusi parkir tapi uangnya tidak masuk ke kas daerah," pesannya.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari dewan, Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara, menjelaskan pada April 2022 lalu Dishub menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT ISS terkait pengelolaan parkir di Sidoarjo.



HEARING - Suasana hearing Komisi B DPRD Sidoarjo dengan Kepala Dishub Sidoarjo terkait kerjasama pengelolaan parkir.

2020 ketika sistem parkir berlangganan dihentikan, kemudian 2021 dan 2022 juga tidak dapat apa-apa karena masa transisi pengelolaan.

"Melihat beberapa persoalan yang terjadi, tahun 2023 ini target pendapatan dari retribusi parkir di Sidoarjo sebesar Rp 10,4 miliar. Jangan sampai ini juga kembali hilang seperti tahun-tahun kemarin. Masyarakat tetap ditarik retribusi parkir tapi uangnya tidak masuk ke kas daerah," pesannya.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari dewan, Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara, menjelaskan pada April 2022 lalu Dishub menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT ISS terkait pengelolaan parkir di Sidoarjo.

Isi perjanjiannya, ISS berhak mengelola 359 titik parkir di Sidoarjo dengan kewajiban menyeter ke kas daerah sebesar Rp 32,09 miliar selama setahun. Kerja sama berlaku selama tiga tahun.

Setelah perjanjian itu, ISS mulai mengusai beberapa lokasi parkir. Termasuk di kawasan GOR Sidoarjo dan sejumlah titik lain.

Dalam perjalanannya, disebut-sebut titik parkir tidak sesuai dengan perhitungan awal. Bahkan juga dilakukan penghitungan ulang yang disebut jumlahnya cuma sekira 87 titik. Itu berdasarkan kajitan yang dilakukan bersama tim dari Universitas Brawijaya.

Sejak mengelola sampai sekarang, menurut Benny, PT ISS belum pernah me-

nyetorkan uang. Beberapa kali ditagih juga tidak disetor dengan beberapa alasan. Termasuk alasan jumlah titik parkir tidak sesuai dan beberapa alasan lainnya.

"Yang selama ini dikelola PT ISS jumlahnya ada sekitar 47 titik. Dan mereka maunya cuma membayar sebagaimana jumlah titik yang dikelola," ungkap Benny.

Dishub mengaku tidak bisa menerima itu karena tidak pernah ada perhitungan bagi hasil. Sejak awal, pengelolaan parkir itu lewat lelang dengan sistem kontribusi nett sebesar Rp 32 miliar. Sehingga kesulitan melakukan penghitungan bagi hasil.

"Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk memutuskan kontrak dengan PT ISS terhitung sejak 9 Januari 2023 kemarin," ujarnya.

Karena di lapangan PT ISS masih terus melakukan penarikan parkir, atau dalam kata lain menolak penghentian perjanjian ini. Benny menyebut pihaknya sudah melayangkan somasi pertama ke perusahaan itu.

Jika somasi juga tidak ditanggapi, sangat mungkin persoalan ini akan berlanjut gugatan ke pengadilan. "Bisa juga demikian, biar nanti pengadilan yang menentukan," tandasnya. (uf)



Anggota DPR-RI dari Fraksi PAN, H. Sungkono di dalam pabrik sepatu miliknya di kawasan Tanggulangin, Karnis (12/7).
(daryanto/duta masyarakat)

H. Sungkono : Jangan Beli Baju dan Sepatu Impor Bekas Bisa Ganggu Kesehatan

SIDOARJO - Anggota Komisi IX DPR RI, H. Sungkono menghimbau kepada masyarakat agar jangan lagi membeli baju dan sepatu bekas. Selain merugikan bagi kesehatan. Impor pakaian bekas juga merugikan industri tekstil dan Industri sepatu dalam negeri.

Anggota DPR RI, Dapil satu Surabaya-Sidoarjo, H. Sungkono secara tegas mulai sekarang masyarakat jangan lagi membeli baju dan sepatu bekas. Pasalnya baju dan sepatu bekas yang di import merugikan industri garmen dalam negeri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Apalagi saat ini, pelaku usaha dalam negeri masih dalam proses pemulihan pascapandemi.

"Barang-barang bekas sudah diatur di Kementerian perdagangan dan itu harusnya tidak boleh di Import. Itu bagian dari sampah, harusnya dimusnahkan karena menyangkut kesehatan," Ujar wakil rakyat dari Fraksi Amanat Nasional

Soal jual-beli baju bekas (thrifting) serta import sepatu bekas. Selain dilarang, impor pakaian bekas juga mer-

ugikan industri dalam negeri. Pasalnya, produk itu dijual murah, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli pakaian/sepatu bekas import.

Sebetulnya, ketentuan Indonesia melarang Import sampah baju/sepatu bekas peraturannya sudah ada. Hanya memang kepastian penegakan hukumnya dan pemerintah harus ditindak secara tegas," Ungkap pria yang pernah selama dua periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tren thrifting beken beberapa tahun ini belakangan. Sungkono menjelaskan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp 9 miliar di Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat.

Pemerintah telah melarang bisnis jual beli pakaian bekas impor. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. ●dar

Perlu Cegah Pernikahan Dini untuk Atasi Gizi Buruk



RAJIN: Balita saat mendapatkan imunisasi dasar untuk mencegah gizi buruk

HENDRIK MULHISONRADAR SIDOARJO

KOTA-Penanganan dan pencegahan stunting rupanya tidak hanya dilakukan kepada balita. Tetapi bisa dilakukan langkah antisipasi mulai dari orang tuanya. Caranya dengan mencegah pernikahan dini.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mendorong Pemkab Sidoarjo untuk mencegah pernikahan dini sebagai upaya untuk mengatasi persoalan gizi buruk. Salah satu caranya bisa dilakukan intervensi secara komprehensif untuk menekan angka gizi buruk hingga nol kasus.

Langkah pencegahan dilakukan pada anak dan remaja usia sekolah agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur dan menghindari kehamilan di luar nikah. Menurut dia, hal ini bisa efektif mencegah gizi buruk. "Karena salah satu penyebab utama munculnya kasus gizi buruk adalah pola asuh orang tua yang tidak baik," katanya.

Sebagian besar pola asuh yang tidak baik itu terjadi pada pasangan muda yang menikah di bawah umur. Hal itu karena mereka secara emosional dan finansial belum stabil.

Lebih lanjut, Aditya menyebutkan bahwa intervensi untuk pencegahan gizi buruk dapat dilakukan mulai dari tingkat sekolah bahkan sekolah dasar. Seperti melakukan sosialisasi tentang pubertas dan edukasi seksual. Untuk mencegah hubungan seks dini yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

"Selain itu edukasi juga para orang tua yang baru memiliki anak lewat puskesmas dan posyandu agar dapat mengasuh anaknya dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, kasus pernikahan usia muda yang masih banyak terjadi ternyata juga menjadi salah satu penyebab stunting yang kian melonjak. Anak yang menikah sebelum usianya, akan rawan dengan perceraian. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sabet Penghargaan Pembina K3 Terbaik V Tingkat Jawa Timur

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sabet penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik peringkat V tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, pada upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 Tingkat Jawa Timur di lapangan bola Prapat Kurung, Perak Timur, Surabaya, Kamis (12/01/23). Peringatan bulan K3 tahun ini mengusung tema "Terwujudnya Pekerjaan Layak Yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Berusaha di Setiap Tempat Kerja".

Selain Kabupaten Sidoarjo, penghargaan tersebut diberikan juga kepada sembilan Bupati/walikota lainnya seperti Surabaya, Gresik, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo.

Gubernur Jatim selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul,

tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan. Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik.

"Karena seringkali luput dalam benak kita, bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik, dapat menghindarkan kita dari resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan terwujudnya pekerjaan layak," ujar Gubernur Jatim.

Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi, usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Pemkab Sidoarjo tidak pernah absen mendapat penghargaan ini setiap tahunnya. Terdapat 66 perusahaan di Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan K3 dalam empat kategori di tahun 2023.

"Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir tetapi lebih kepada motivasi untuk selalu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan," ujarnya.



Wabup Sidoarjo H. Subandi SH saat menerima penghargaan

Dikatakannya dengan penerapan K3 yang baik dapat menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya. Wabup berharap kedepan dapat terus mendorong, mensupervisi, dan membina perusahaan yang ada untuk membudayakan K3 dan menerapkan sistem manajemen K3 (SMK3).

"Ini diharapkan menjadi motivasi perusahaan lain di Sidoarjo, untuk memaksimalkan

penerapan budaya K3 sehingga zero accident tiap perusahaan di Kabupaten Sidoarjo dapat ditekan," ucap H. Subandi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia menyebutkan bahwa pada tahun ini sebanyak 66 penghargaan diraih perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 4 kategori dalam Bulan K3.

"Ada 66 perusahaan penerima penghargaan yakni Pertama,

Zero Accident Award (ZAA) Kecelakaan Kerja Nihil diterima 28 perusahaan. Kedua, Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja (P2 HIV-AIDS) diterima 4 perusahaan, ketiga, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diterima 19 perusahaan. Keempat, Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja (P2 Covid-19) diterima 15 perusahaan," ujarnya. (Khol/ Ben)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Subandi Perjuangkan Pengisian Kekosongan 136 Kasek

Sidoarjo, Bhirawa

Kekosongan jabatan kepala sekolah di wilayah Sidoarjo sudah berjalan cukup lama. Karena minunya calon, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo memberikan solusi dengan mengangkat Plt. Terdapat 136 kepala sekolah yang kosong, untuk SDN sebanyak 131 lembaga dan SMPN 5 lembaga.

Melihat kondisi tersebut, Wakil

Bupati Sidoarjo H Subandi, SH dengan tegas mengatakan kalau kondisi tersebut terus terjadi, maka proses pembelajaran di sekolah hasilnya bisa dipastikan tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pihaknya akan bantu memperjuangkan percepatan pengisian jabatan Kepala SDN dan Kepala SMPN yang kosong tersebut.

"Saya akan kordinasikan dengan Gus Bupati (Bupati Sidoarjo Ah-

mad Muhdlor_red), agar segera ada proses pengisian kepala sekolah," tegas Subandi usai membuka Advokasi Implementasi Kebijakan Dikbud Bagi Kepala SDN dan SMPN, pada (11/1) kemarin.

Jadi kalau kepala sekolah dipegang oleh Plt, tentu belum bisa menjalankan fungsinya hingga 100 persen. Makanya kondisi ini akan kita dorong agar nantinya semua bisa tercover biar cepat selesai. "Yang namanya mutasi itu tentunya merupakan kebijakan Bupati, jadi harus melalui tahapan dan aturan-aturan yang harus dipersiapkan. Sekali lagi saya akan dorong dan melakukan koordinasi dengan Gus Bupati dan pihak Dikbud untuk menyelesaikan persoalan ini," tegas Politisi PKB ini.

Sementara itu, Kepala Dikbud Sidoarjo Dr Tirta Adi, MPd juga mengungkapkan kalau hingga sekarang ini Kepala SDN yang kosong sebanyak 131 sekolah dari 464 lembaga. Untuk SMPN sebanyak 45 lembaga yang kosong ada 5 sekolah. "Sesuai dengan regulasi, kekosongan ini bisa diisi dengan mengangkat Plt. Masa tugasnya paling lama 3 bulan, selebihnya bisa diangkat

kembali satu kali dalam masa jabatan Plt. Karena keterbatasan kepala sekolah, Plt ini bisa berjalan hingga lintas tahun," ungkapnya.

Ia katakan, Permendikbud No. 40 tahun 2021 memberikan peluang kepala sekolah bisa diangkat dari guru penggerak. Guru penggerak untuk jenjang SDN sebanyak 43 orang, untuk jenjang SMPN ada 18 orang.

Dari 43 guru penggerak itu yang bisa diangkat sebanyak 31 orang. Karena 1 orang sudah mutasi keluar, yang 2 orang sudah menjadi kepala sekolah dan yang 9 orang masih golongan 3A.

"Padahal untuk menjabat sebagai kepala sekolah minimal harus golongan 3B," jelas Pak Tirta sa-paan akrabnya.

Di lain pihak, materi guru penggerak mayoritas ada di pembelajaran. Padahal untuk menjadi kepala sekolah harus mempunyai aspek manajerial dan leader. "Oleh karena itu mereka akan kita kuatkan kompetensi manajerial dan leadership/kepemimpinannya. Mudah-mudahan harapan kami tahun 2023 ini bisa terselenggara baik," harap Tirta Adi. [ach.why]



ahmad suprayogibhirawa

Usai memberi pengarahan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menyapa KS peserta Advokasi.

HARIAN
Bhirawa
Media Sidoarjo Bhiru Weekend



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jadi Motivasi untuk Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan

Pemkab Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik peringkat V tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi pada upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 Tingkat Jawa Timur di, Surabaya, Kamis (12/1)

ANNISA FIRDAUSI, Wartawan Radar Sidoarjo

PERINGATAN bulan K3 tahun ini mengusung tema "Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Berusaha di Setiap Tempat Kerja". Selain Sidoarjo, penghargaan tersebut

diberikan juga kepada sembilan bupati/walikota lainnya. Seperti Surabaya, Gresik, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo. Gubernur Jatim selaku Inspektur

● Ke Halaman 10



APRESIASI: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi.



Jadi Motivasi...

Upacara membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah. Dia menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan. Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik. "Karena seringkali luput dalam benak kita, bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik, dapat menghindarkan kita dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan terwujudnya

pekerjaan layak," ujar Khofifah.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Pemkab Sidoarjo tidak pernah absen mendapat penghargaan ini setiap tahunnya. Terdapat 66 perusahaan di Sidoarjo yang

mendapatkan penghargaan K3 dalam empat kategori di tahun 2023. "Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir tetapi lebih kepada motivasi untuk selalu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan," ujarnya. Dikatakannya, dengan penerapan

K3 yang baik dapat menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya. Wabup berharap ke depan dapat terus mendorong, mensupervisi, dan membina perusahaan yang ada untuk membudayakan K3 dan menerapkan sistem manajemen K3 (SMK3). (*/vga)



Gandeng Baznas, Pemkab Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan bedah rumah milik Nanik Hariyati warga Tropodo, Krian, sebagai respons laporan kepala desa setempat.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi bersama dengan Baznas Kabupaten Sidoarjo segera melakukan bedah rumah karena kondisinya yang hampir roboh.

"Hari ini saya turun inspeksi merespons laporan kepala desa, ke rumah Nanik Hariyati yang sedang hamil tua bertempat tinggal di rumah yang hampir roboh. Pemkab membantu sembako dan bedah rumah dari Baznas Kabupaten Sidoarjo untuk merenovasi secepatnya rumah beliau," ucapnya.

Ia berpesan kepada Kades Tropodo Kecamatan Krian agar secepatnya atap rumah Nanik diperbaiki dan dalam dua atau tiga hari ke depan dengan gotong royong.

Wabup juga meminta warga seperti ini dapat tersentuh program bantuan desa seperti bantuan langsung tunai (BLT) serta dinas sosial untuk ikut membantu pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis.

"Saya meminta kepala desa untuk gotong royong saling membantu tenaga untuk renovasi rumah agar layak ditempati serta bantuan sosial juga harus diperhatikan kepada keluarga ibu Nanik ini," ujarnya.

Ia mengatakan, jika masih memiliki BPJS mandiri yang nantinya akan dibantu Dinsos Sidoarjo untuk di masukkan jaminan kesehatan gratis satu keluarga dari Pemkab Sidoarjo dikarenakan kategori warga tidak mampu.

Wabup Subandi mengatakan sinergitas penanganan warga tidak mampu secara bersama-sama seperti inilah yang diharapkan. Mulai dari ketua RT, RW, Kades turut serta menanggulangi warga masyarakat yang kurang mampu.

"Perihal penanganan warga masyarakat miskin atau tidak mampu ini harus kita jalankan bersama, agar tidak ada lagi keluhan warga masyarakat miskin," tutupnya. (udi)



BMGT

BEDAH RUMAH: Wakil Bupati Sidoarjo Subandi bersama dengan Baznas Kabupaten Sidoarjo mengunjungi rumah salah satu warga tidak mampu.



BM19T

PEMBEKALAN: Ratusan kepala sekolah di Sidoarjo mengikuti pembekalan advokasi implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Ratusan Kepala Sekolah Ikut Advokasi Kebijakan Pendidikan

SIDOARJO (BM) - Sebanyak 333 kepala sekolah dasar negeri, 40 kepala SMPN serta 2 Kepala Taman Kanak-Kanak di Sidoarjo mengikuti advokasi implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan, kegiatan ini merupakan kali pertama dilakukan guna untuk meningkatkan hubungan lintas sektor serta komitmen terkait penyusunan kebijakan pengembangan strategi dan implementasi program pendidikan dan kebudayaan di wilayah setempat.

"Selain itu, untuk memastikan pendidikan dan kebudayaan sampai kepada masyarakat dan memberikan output yang diharap-

akan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan seperti itu diharapkan juga meningkatkan kesadaran kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku demi mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Menurut dia, kegiatan tersebut penting dilaksanakan mengingat kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara cermat, strategi dan dikawal untuk mencapai tujuan dan keberhasilan.

Advokasi, kata wabup, diharapkan agar implementasi kebijakan pendidikan dan kebu-

dayaan lebih tersosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dinilai akuntabilitas dan transparansi keberlanjutan di masa mendatang. "Kegiatan pertama kali ini dilakukan sebagai tolok ukur kebijakan SD maupun SMP," ujarnya.

Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan maupun dari kepolisian maka bisa dijadikan pondasi dalam membuat kebijakan, dengan begini tentu tidak akan ada rasa takut dalam menjalankan tugas maupun fungsi kepala sekolah SD maupun SMP.

"Saya harapkan ada pendekatan secara personal yang nantinya bisa dilakukan dengan baik dalam menentukan kebijakan-kebijakan tanpa ada rasa takut demi kebaikan kita bersama," ucapnya. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Baznas Perbaiki Atap Rumah Warga Miskin Nyaris Ambruk

Sidoarjo, Bhirawa

Rumah warga kurang mampu di Desa Tropodo Kec Krian, yang atapnya selama ini nyaris ambruk, akhirnya dapat bantuan program bedah rumah dari Baznas Sidoarjo, untuk diperbaiki. Datang ke lokasi, Rabu (11/1) kemarin, diantaranya, Wabup Sidoarjo, Subandi, didampingi Kepala Dinsos Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir, Camat Krian Ahmad Fauzi, perwakilan dari Baznas Sidoarjo dan Kades Tropodo.

Nanik Hartatik, pemilik rumah, selain sebagian atap rumahnya yang bakal diperbaiki, dirinya yang saat ini dalam kondisi hamil yang usia kandungannya sudah tua tersebut, juga mendapatkan bantuan berupa Sembako. Dalam dua atau tiga hari kedepan, rumah warga kurang mampu tersebut, diperintahkan supaya segera dilakukan perbaikan dengan gotong royong.

Dinas Sosial Kab Sidoarjo, diminta agar warga kurang mampu ini dapat tersentuh program bantuan langsung tunai (BLT). Juga diminta untuk segera menguruskan BPJS gratis kepada pemilik rumah tersebut. Agar bisa dimanfaatkan untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.[kus.ca]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DIDUGA BISNIS VAKSIN HEWAN

Sidoarjo, Pojok Kiri

Insiden vaksinasi hewan peliharaan kucing milik Solik warga Ketimang Wonoayu Sidoarjo pada tanggal 10/1/03 kemarin menuai kritik dari pemilik kucing. Solik saat membawa kucingnya bernama Moli ke dinas Pertanian dan Peternakan kab Sidoarjo untuk pengobatan vaksin ke drh. hewan Arip Wahyu, setelah itu langsung dilakukan penyuntikan vaksin diruangannya ceritanya. Sedangkan Solik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 12/1/23 terkait dugaan drh Arif dari dinas Pertanian dan Peternakan yang melakukan bisnis vaksin hewan, ia sempat terkejut dibuatnya. Menurut dia yang sangat mengejutkan baginya setelah suntik vaksin dr. arif langsung bilang ini ada biayanya pak, berapa tanya Solik, dr jawab Rp 150 ribu. Katanya.

Solik sempat kaget karena diawal tidak dibilangi kalau kena biaya, dia kira gratis karena menurutnya pakai fasilitas anggaran pemerintah, ucap



Kwitansi vaksin kucing

Solik. Sementara dokter bilang untuk vaksin kucing itu memang ada biayanya karena tergolong hewan mahal, pengobatan vaksin kucing itu obatnya beli pakai uang pribadi, tidak dianggarkan sama pemerintah jadi harus bayar, terang drh Arif.

Sedang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Eny saat dikonfirmasi terkait vaksin yang ada biayanya, langsung

jawab melalui WA hubungi Kabid saya aja pak jawabnya.

Sedang tidak lama lagi Kabid Pertanian dan Peternakan langsung ditelepon oleh Solik, ia membenarkan bahwa kalau vaksin kucing itu memang dikenakan biaya Rp 150 karena untuk pembelian obat vaksin itu pakai uang sendiri tidak dianggarkan di APBD. Jawabnya. Anehnya menurut Solik, drh Arif me-

nawarkan kalau memang keberatan ya tidak apa, uang kami kembalikan. Katanya. Solik tidak keberatan namun dia mengkritisi pada dinas Pertanian dan Peternakan bahwa segala kegiatan dan aktivitas dinas itu dianggarkan oleh APBD bukan uang pribadi. Kritik Solik yang kesehariannya sebagai ketua LSM AMPK Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi kabupaten Sidoarjo. Kritiknya

pada wartawan. Dirinya bakal melakukan Pulbaket dan Puldata dan jika nanti terbukti ada dua alat bukti yang mendukung tindak pidana terkait dugaan bisnis vaksinasi hewan oleh dinas Pertanian dan Peternakan. "Akan laporkan secara resmi ke Kejaksaan Sidoarjo maupun ke Polresta Sidoarjo guna membuat efek jera pada oknum dinas itu," cetusnya. (Khol/Li/Bersambung)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dispendukcapil Integrasikan Layanan Akta Lahir dengan RS Swasta



PELAYANAN: Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Redi Kusuma (dua dari kiri) saat penandatanganan kerja sama dengan perwakilan RS swasta.

KOTA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo terus berupaya meningkatkan dan memudahkan layanan kepada masyarakat. Terbaru, Dispendukcapil menjalin kerja sama dengan 11 rumah sakit (RS) swasta di Sidoarjo, Kamis (12/1).

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Redy Kusuma mengungkapkan, kerja sama itu terkait penerbitan paket akta kelahiran dan akta kematian. Pihaknya

berusaha mengintegrasikan layanan kedua paket tersebut dengan 11 rumah sakit swasta di Sidoarjo. "Bayi lahir pulang bisa langsung punya akta," jelasnya.

Redy menguraikan, dengan kerja sama yang telah ditandatangani itu nanti bakal ada petugas RS yang membantu pengu-rasan administrasi. Petugas akan diberi password untuk mengakses website

plavondukcapil. Sehingga ketika ada bayi

lahir, petugas akan mengurus semua administrasi terkait. Mulai dari akta lahir, kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA). Termasuk jika ada kejadian kematian di rumah sakit. Petugas akan membantu menguruskan dokumen terkait seperti akta kematian dan keterangan waris. "Tentu ini akan makin memudahkan masyarakat," katanya.

Dokumen yang telah tuntas itu akan terkirim ke email pasien. Kecuali

untuk KIA yang bisa diambil di Mal Pelayanan Publik atau kecamatan.

Kerja sama itu juga menjadi salah satu langkah Dispendukcapil untuk meningkatkan pencatatan pada penduduk. Mulai dari data kelahiran, anak hingga kematian.

Redy menambahkan, kerja sama itu juga akan terus ditingkatkan. Agar layanan serupa makin merata. Sasaran berikutnya adalah dengan puskesmas di Sidoarjo. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SALAH SATU DESA DI KECAMATAN KRIAN DIDUGA PROYEK SILUMAN

Sidoarjo, Pojok Kiro

Pembangunan infrastruktur yang diduga berlokasi di desa Tempel Kecamatan Krian Diduga proyek "Siluman", pasalnya tidak ada papan nama proyek terpasang, padahal kegiatan tersebut sudah berjalan perkiraan 80%. Akibatnya, masyarakat sulit untuk memantau dan mengawasi Pembangunan tersebut sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang/peraturan yang berlaku karena tidak mengetahui jumlah Pagu Anggaran dan Volume kegiatan fisik tersebut.

"Saat awak media konfirmasi ke kantor kepala desa untuk me-

mintakan keterangan kepada kepala Desa/Sekretaris Desa semuanya tidak ada di tempat, konfirmasi sekdes melalui Nomor WA di nomor 08123XXXXXXX juga tidak ada jawaban" Kamis (12/1).

Hal teknisnya tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatannya dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

salah satu peraturan yang diterapkan atau teknisnya adalah wajibnya pemasangan papan

informasi/pengumuman oleh para pelaksana kegiatan sesuai dengan prinsip transparansi anggaran dan wajib dibuat oleh Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran atau TPK yang berisi informasi tentang kegiatan mulai dari Nama Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Nilai Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Sumber anggaran. Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan di pertegas Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Nang)



POJOK KIRO
KORAN RAKYAT

Terkait Air PDAM Asin, Direktur Pelayanan Terkesan Menghindar

SIDOARJO - Beberapa warga Rusunawa di Kelurahan Pucang, Sidoarjo mengeluhkan aturan baru pembayaran sewa yang dianggap makin berat tapi fasilitas buruk, terutama air yang disuplai PDAM (PERUMDA Sidoarjo) terasa asin menjadikan pertanyaan.

Kualitas air dalam Rusunawa Pucang yang dikelola langsung Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (DP2CKTR) ini dianggap masih keruh dan asin. Padahal pihak pengelola mengklaim air berasal dari Perumda Delta Tirta (PDAM).

"Air di sini kadang keruh dan asin sehingga mengganggu aktivitas memasak dan mencuci," ujar Y salah satu ibu penghuni Rusunawa Pucang yang identitasnya sengaja tak dicantumkan ini, Kamis (12/1/23).

"Saya berharap fasilitas terutama air bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Karena air bersih setiap harinya sangat dibutuhkan semua penghuni," tandasnya

Terkait fasilitas air, saya berharap diberikan air yang layak atau jernih bisa buat memasak (PDAM) karena sampai hari ini air masih terasa asin dan terkadang juga berupa keruh,"pungkas Y.

Sementara penghuni Rusunawa Pucang lainnya berharap pihak pengelola lebih bijak dengan meningkatkan fasilitas ketimbang membuat aturan baru pembayaran sewa yang memberatkan. Namun juga jika tidak demikian bisa jadi malah tidak terawat rusunnya

Dikesempatan berbeda Direktur Pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo Fathul Faizin, S. Sos., M.A.P saat hendak dikon-



Kantor Perumda Delta Tirta Sidoarjo Kamis (12/1/23)

firmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan besuk kabar-kabaran mas, khawatirnya sudah janji, tiba-tiba ada acara mendadak.

"Masih meeting diluar soal RSI SH kang, dan juga panitia satu abad NU yang diselenggarakan pada tanggal 7 Pebruari 2023," begitu balasan pesan WhatsApp Direktur Pelayanan Paijo biasa disapa

Menanggapi hal ini Arief Nuryadin, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LSM Government Watch yang datang ke kantor Perumda Delta Tirta Sidoarjo bersama rekan wartawan mendapat kabar Direktur Pelayanan tidak ada ditempat.

"Kalau itu benar air PDAM di rusun Pucang asin rasanya perlu dipertanyakan kualitas pelayanan air bersih dari pdam, itu diambilkan dari mana dan

air seperti itu tidak layak untuk digunakan," tegas Arief Kamis(12/1/23)

Perlu diketahui kami juga sudah berkirin surat untuk klarifikasi dan konfirmasi i terkait perkara di rusunawa, namun surat kami rupanya sengaja diabaikan dengan alasan yang tidak jelas dan belum ada informasi guna terkait surat yang kami kirimkan ke Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (DP2CKTR).

"Ketika hal ini mau dikonfirmasi ke direktur pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersangkutan tidak ada ditempat, dengan alasan ada rapat diluar tapi menurut saya direktur pelayanan terkesan menghindar terkait perkara air pdam yang terasa asin,"pungkas Arief. ●loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Hujan Disertai Angin Kencang Robohkan Gapura Desa Kenongo

Akibat hujan deras disertai angin kencang banyak rumah atapnya runtuh

Sidoarjo, Pojok Kiri

Sore hari hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah kecamatan di Sidoarjo Kamis (12/1/2023).

Sedangkan kawasan yang dilanda hujan angin tersebut, di antaranya Kecamatan Sidoarjo, Wonoayu, Tulangan dan Tanggulangin.

Hujan deras tersebut juga mengakibatkan sejumlah pepohonan runtuh. Seperti di Tulangan ada laporan sebuah gapura di Desa Kenongo Kec. Tulangan roboh.

Di tempat lain yakni di kawasan Tanggulangin, juga ada sebuah tiang anten BTS (Base Transceiver Station) di samping tiang listrik milik PLN yang berdiri di Kali Sampurno roboh. Robohnya infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel

antara peranti komunikasi dan jaringan operator di RT 9 RW 3 Kalisampurno itu menjadi beberapa bagian, dan tiangnya berserakan dan menimpai rumah. "Roboh persis saat hujan, akibat terhempas angin," ucap Bobby warga sekitar.

Selain menimbulkan tiang provider roboh, sebagian atap rumah warga di kawasan Desa Kludan Tanggulangin juga mengalami kerusakan atau lepas dari rangkanya.

Sampai saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sidoarjo masih keliling melihat situasi dan melakukan pendataan. "Info awal ada BTS yg roboh. Sementara petugas masih perjalanan ke lokasi," jawab Kepala BPBD Kab. Sidoarjo, Ir.H. Dwijo Prawiro, MT. (Khol/ Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pegawai Tua Tetap Berguna

SAAT ini zamannya sudah serba menggunakan teknologi informasi. Diakui pegawai ASN maupun juga pegawai yang ada di pemerintahan desa, yang usianya sudah masuk dalam kategori tua, kadang sulitnya minta ampun untuk cepat beradaptasi, belajar menguasai kemajuan zaman tersebut.

“Hari ini diajari komputer, besok sudah lupa lagi,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, Drs

Probo Agus Sunarno MSi, Rabu (11/1) kemarin, saat ikut rapat koordinasi tentang data pemerintahan yang valid dan real-ible lewat SIPRAJA.

►► ke halaman 11



Drs Probo Agus Sunarno Msi

HARIAN
Bhirawa
Wala Negeri Wala Negeri

Pegawai Tua Tetap Berguna

● Sambungan hal 1

Diakui memang berbeda dengan pegawai yang usianya masih muda. Mereka lebih cepat menangkap untuk menjalankan tugas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang ada. Namun demikian, menurut Probo, kedua-duanya harus tetap bisa bekerja bersama-sama. Sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Jangan sampai ada yang merasa lebih unggul. Karena berhasil tidaknya pekerjaan di tempat kerja mereka, sangat tergantung dengan adanya kerja sama yang kompak dan solid atau tim work.

“Meski pegawai tua tidak bisa IT, mereka juga tetap berguna. Dengan pengalaman kerja mereka yang lebih lama dan senior, mereka bisa menjadi pimpinan kegiatan,” kata mantan Camat Wonoayu itu.

Ditambahkannya, apalagi persoalan-persoalan yang dihadapi di pemerintahan desa, menurut Probo, tidak melulu hanya persoalan IT saja. Namun juga banyak persoalan-persoalan non IT lainnya. Yang juga minta ada penyelesaian dengan segera.

“Jadi pegawai yang tua dan pegawai yang muda, tetap bekerja sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga pekerjaan untuk melayani kepada masyarakat, tidak sampai berhenti,” jelasnya. [kus]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Drainase Sempit, Jalan Pahlawan Langganan Banjir

Sidoarjo, Memorandum

Karena sering terjadi banjir saat musim hujan, membuat warga di sekitar Jalan Pahlawan, samping RS Delta Surya mengeluhkan gorong-gorong (*drainase*) saluran pembuangan yang tak maksimal.

Seperti yang diungkapkan Arif, salah seorang warga Pondok Jati Sidoarjo, Arif, Rabu (11/1).

"Di Jalan Pahlawan di samping Rumah Sakit Delta Surya, saluran drainasenya macet, mungkin karena banyak sampah. Alhasil ketika musim hujan, jalanan selalu banjir," ungkapnya.

Arif menjelaskan, jika baru hujan sebentar, dalam hitungan menit sudah banjir. Hal itu dikarenakan drainase sempit dan banyak sampah.

"Akibatnya *drainase* mampet membuat air dari sepanjang Jalan Pahlawan bawah jembatan tol sampai samping Rumah Sakit Delta Surya sering terjadi banjir dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas," sahutnya.

Arif berharap pemerintah untuk dapat membenahi saluran. Selain untuk mengantisipasi banjir, juga agar kesehatan dan kebersihan permukiman terjamin," harapnya. (yud/jok/mik)



Saluran air yang macet menjadi penyebab banjir.

FOTO MEMORANDUM YUD

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



DITERJANG ANGIN: Tiang base transceiver station (BTS) ambruk menimpa rumah warga di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, kemarin (12/1). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Tiang BTS Setinggi 24 Meter Timpa Rumah di Tanggulangin

SIDOARJO – Angin kencang dan hujan deras yang menerpa Tanggulangin kemarin (12/1) sore membuat sebuah tiang *base transceiver station* (BTS) milik salah satu *provider* yang berada di tengah permukiman RT 09, RW 03, Desa Kalisampurno, roboh dan merusak rumah warga.

Tiang setinggi 24 meter dengan diameter sekitar 50 sentimeter tersebut ambruk setelah diterpa angin kencang. Sutrisno, 47, warga sekitar, mengatakan bahwa sore itu sekitar pukul 15.30 hujan deras dan angin kencang melanda desa yang berbatasan dengan Kecamatan Porong tersebut. "Mobat-mabit anginnya, Mas, ke sana ke sini setengah jam," ujarnya.

Menurut dia, tiang BTS tersebut berdiri sejak 2014. "Nggak sering ada pengecekan, kelihatannya tadi mur bautnya gimana gitu kena angin, makanya roboh," tuturnya. Dia mengatakan, setiap hujan

disertai angin kencang warga selalu takut karena tiang sering bergoyang.

Sementara itu, Muhammad Firdaus, 32, pemilik rumah tersebut, mengatakan bahwa tidak ada orang sama sekali di dalam rumah yang tertimpa tiang BTS tersebut. "Itu sebenarnya rumah bapak, terus sudah kejual. Kosong. Isinya tinggal bahan buat *home industry* tas," tuturnya.

Tampak beberapa bagian tiang dengan panjang sekitar 5 meter masih nangkring di atap ruang tamu rumah seluas sekitar 500 meter persegi itu.

Selain atap rumah, sebuah mobil milik keluarga korban yang berada di sisi kanan rumah ikut terkena imbas ambruknya tiang itu. Selepas kejadian tersebut, aliran listrik seluruh rumah di RT 09, RW 03, tersebut sempat mati. Akan tetapi sekitar pukul 18.00, listrik sudah kembali menyala.

Sementara itu, Polsek Tanggulangin datang selang satu jam setelah kejadian. Kapolsek Tanggulangin Kopol I Putu Angga Feriyansyah yang turun langsung kemudian menggerakkan petugasnya untuk memasang garis polisi.

"Kami sudah memberi garis polisi agar warga tidak mendekati ke lokasi," ujarnya. Angga juga sudah menghubungi pihak *provider* terkait serta alat berat untuk mengecek dan mengevaluasi tiang yang menimpa rumah warga. Pihaknya juga akan menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kejadian tersebut.

Pada pukul 19.22, truk milik PLN datang untuk mengecek tiang listrik yang berada di dekat tiang BTS yang ambruk. Sedangkan pihak *provider* dan alat berat belum tampak. "Ini kabarnya masih perjalanan menuju ke sini," ungkap perwira polisi berpangkat melati satu itu. (eza/c6/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Tampak tower selular yang roboh menimpa rumah warga sedang dilakukan evakuasi oleh tim BPBD Sidoarjo.

Tower Selular Diterpa Angin Kencang

Roboh, Timpa Rumah Warga Sidoarjo

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Akibat angin kencang, sebuah tiang seluler di RT 9 RW III, Desa Kalisampurna, Kecamatan Tanggulangan ambruk dan menimpa rumah warga, Kamis (12/1/2023).

Tidak hanya merusakkan rumah, kejadian tersebut juga mengakibatkan sebuah mobil Toyota Inova pecah kaca bagian belakang. Rumah yang tertimpa tiang berdiameter 40 sentimeter tersebut milik

Kasman. Terlihat atap bagian depan tersebut rusak berat dan berlubang.

Firdaus anak Kasman menceritakan, bencana tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

"Tadi kejadiannya saat hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba tiang disebelah Selatan rumah ambruk. Untungnya tidak ada orang di dalam," tuturnya. Ia menambahkan, di dalam ruang

tamu terdapat tumpukan material kulit untuk bahan tas.

"Saya tidak berani mengevakuasi barang karena khawatir ambruk," imbuhnya. Dia berharap pemilik tiang seluler bertanggung jawab memperbaiki mobil dan rumahnya yang rusak.

Sementara itu Samsuri (64) warga setempat mengatakan, tiang tersebut telah berdiri sekitar 8 tahun yang lalu.

"Tadi saya pas di depan rumah dan sangat kaget. Tiang yang roboh tersebut terdiri dari enam ruas dan baut perekatnya semua lepas," jentrenya.

Hingga saat berita ini ditulis, pihak pemilik tiang seluler belum datang ke lokasi. Namun beberapa petugas PLN dan BPBD Sidoarjo telah datang untuk mengamankan lokasi karena dikhawatirkan aliran listrik masih ada. (cat/ns)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim